

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

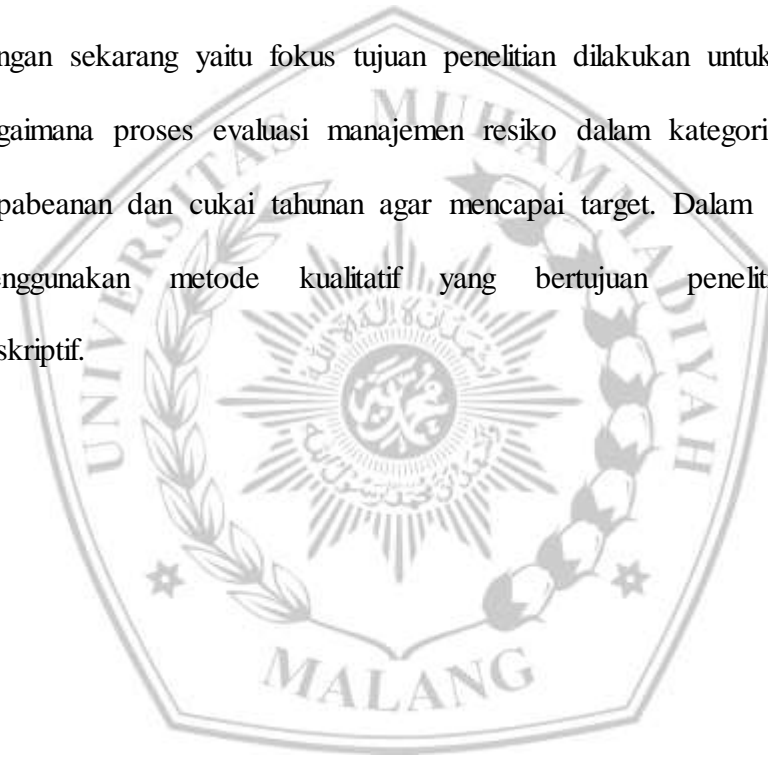
Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Firdiansyah dalam jurnal tahun (2019) penelitian ini membahas tentang bagaimana identifikasi risiko dan penetapan tarif kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah berjalan sesuai aturan, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu, Hanya memprioritaskan pembebanan tarif kepabeanan semata, Materi yang dibahas dalam identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan harus mempertimbangkan risiko penting/utama yang bukan risiko penerimaan Negara (risiko fiskal) semata.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Oktianto dan Budi dalam jurnal tahun (2018) penelitian yang membahas bagaimana klasifikasi profil risiko cukai, penelitian menggunakan metode kuantitatif dan observasi agar tujuan penelitian lebih deskriptif. Hasil penelitian adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berbasis manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di lingkungan administrasi kepabeanan dan cukai dapat diterapkan menggunakan metode klasifikasi pada teknologi data mining. Penelitian ini

termasuk kategori klasifikasi multi kelas karena atribut output atau target terdiri dari tiga kelas yaitu risiko rendah (L), sedang (M), dan tinggi (H).

Fokus penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang dapat diketahui dengan melakukan perbandingan atas penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti sekarang. Perbedaan focus penelitian tersebut meliputi alat analisa, teknik analisa yang di gunakan.

Peneliti sekarang Nanda (2019), hubungan peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu fokus tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi manajemen resiko dalam kategori penerimaan kepabeanan dan cukai tahunan agar mencapai target. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan penelitian bersifat deskriptif.



## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau Bea Cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *douane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*. Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang setara dengan unit eselon 1 yang berada dibawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain.

### 2. Kepabeanan

Pabean yang dalam bahasa inggrisnya Customs atau Duane dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus Bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu. Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri

yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persenyang ditentukan oleh Negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industry dalam negri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengambilan restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negri.

a. Fungsi dan Kegiatan Kepabeanan

Kepabeanan mempunyai fungsi sebagai pegawai di satu pihak dan pelayanan di lain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke luar daerah pabean. Sebagai tambahan yang dititipkan oleh instansi-instansi teknik, berupa peraturan mengenai pembatasan dan larangan serta tata niaga. Sebaliknya pabean (dalam hal ini Menteri Keuangan) dibebankan untuk memberikan insentif bagi pengguna jasa dengan cara memberikan pembebasan atau keringanan pajak lalu lintas barang. Dua hal yang sangat kontradiktif antara tugas

pengawasan dan pemberian fasilitas, selain itu menyelenggarakan perumusan dan fungsi kebijakan kepabeanan dan cukai, penyusun norma, standar, prosedur dan criteria kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan administrasi bea dan cukai. Pemberian fasilitas ini juga mengandung banyak risiko, misalnya dalam fasilitas ekspor yang disalahgunakan menjadi ekspor fiktif, atau fasilitas impor gula, beras telah terjadi penyimpangan, sehingga dalam penentuan tingkat risiko kedua bahan kebutuhan dimaksud dikenakan pengawasan yang ketat dan dikategorikan komoditi berisiko tinggi.

Dalam kepabeanan dikenal adanya beberapa kegiatan yang terkait perdagangan Internasional, seperti :

- 1) Impor diartikan bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu Negara ( luar negeri) ke dalam wilayah pabean Negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bias diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua Negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai Negara penerima . Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Purnawati, 2013: 13)

2) Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Permintaan ekspor adalah jumlah barang atau jasa yang diminta untuk diekspor dari suatu Negara ke Negara lain (Sukirno, 2010). Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke Negara lain.

b. Dasar Hukum Kepabeanan

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, pengertian kepabeanan yang telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 402) sebagai berikut :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeanan serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”

Definisi tersebut merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan (termasuk didalamnya penegakan hukum) adalah daerah yuridis diksinya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007

pengertian pengawasan lebih cenderung bertujuan pembinaan, pengaturan, dan perhatian terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut (sifat karakteristik dari barang kena cukai). Berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat diartikan sebagai: Bidang pengawasan merupakan bagian dari penegak hukum, yaitu suatu upaya dari pemerintah untuk dipatuhinya ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibidang pajak lalu lintas barang. Kepastian hukum dan kepatuhan terhadap hukum menunjukan adanya pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya di satu pihak dan partisipasi aktif masyarakat dalam kewajiban kenegaraannya. Penegakkan hukum di bidang kepabeanan dan cukai menggambarkan pengakuan pengguna jasa dan masyarakat terhadap otoritas Bea dan Cukai di dalam daerah pabean.

c. Daerah Pabean

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang kepabeanan (Ali Purwito M, 2013:39).

3. Cukai

Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan/atau karakteristik

yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (Undang-undang no 39 tahun 2007 atas Undang-undang no 11 tahun 1995). Cukai merupakan pungutan Negara dan berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut barang kena cukai (Purwito, 2014:408).

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

a. Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredaranya perlu diawasi



- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- 4) Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan (Undang-Undang Cukai,2007).

b. Penanggung Cukai

Penanggung Cukai ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran cukai, Sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban cukai termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menurut Undang-Undang Kepabeanan Penagihan Cukai.

4. Manajemen Risiko

Menurut Djojosoedarso (2003), Pengertian Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, masyarakat, dan instansi. Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

Menurut Fahmi (2010), Pegertian Manajemen Risiko itu adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada

dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis

Proses manajemen risiko dapat dibagi ke dalam 8 komponen (tahap) sebagai berikut :

- a. *Internal environment* (Lingkungan internal) Komponen ini berkaitan dengan lingkungan dimana perusahaan berada dan beroperasi. Cakupannya adalah *risk-management philosophy* (kultur manajemen tentang risiko), *integrity* (integritas), *risk-perspective* (perspektif terhadap risiko), *risk-appetite* (selera atau penerimaan terhadap risiko), *ethical values* (nilai moral), struktur organisasi, dan pendelegasian wewenang.
- b. *Objective setting* (Penentuan tujuan) Manajemen harus menetapkan *objectives* (tujuan-tujuan) dari organisasi agar dapat mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola risiko
- c. *Event identification* (Identifikasi risiko) Komponen ini mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi
- d. *Risk assessment* (Penilaian risiko) Komponen ini menilai sejauhmana dampak dari events (kejadian atau keadaan) dapat mengganggu pencapaian dari *objectives*. Besarnya dampak dapat diketahui dari *inherent* dan *residual risk*, dan dapat dianalisis dalam dua perspektif, yaitu: *likelihood*

(kecenderungan atau peluang) dan *impact/consequence* (besaran 10 dari terealisirnya risiko).

- e. *Risk response* (Sikap atas risiko) Organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. *Risk response* dari organisasi dapat berupa: (1) avoidance, yaitu dihentikannya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko; (2) reduction, yaitu mengambil langkahlangkah mengurangi likelihood atau impact dari risiko; (3) sharing, yaitu mengalihkan atau menanggung bersama risiko atau sebagian dari risiko dengan pihak lain; (4) acceptance, yaitu menerima risiko yang terjadi (biasanya risiko yang kecil), dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan.

